

Proposal Hibah Skala Kecil

RIT-CEPF Wallacea Biodiversity Hotspot

Informasi Organisasi

Nama Organisasi: YAYASAN AYU TANI MANDIRI

Kategori Organisasi:

- Organisasi Masyarakat (Agama/Pemuda/Parpol/Perempuan/Veteran)
- Organisasi Basis (Kel. Tani/Nelayan/Pengelola Hutan/Masyarakat Adat/Koperasi)
- LSM/NGO Lingkungan Hidup/Konservasi
- LSM/NGO Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat**
- Organisasi Sosial/Kesehatan Masyarakat
- Lembaga Advokasi/Bantuan Hukum
- Lembaga Pendidikan/Penyuluh/Penyadaran Masyarakat
- Organisasi Profesional/Kelompok Intelektual
- Lembaga Penelitian/Kajian/Universitas
- Bagian dari perusahaan yang bergerak untuk kepedulian sosial dan lingkungan (CSR)
- Media

Nama Penanggung Jawab Organisasi: THOMAS URAN

Nama Koordinator Proyek: ARDIANA LIDYA NATALIA

Alamat Email Organisasi: thomuran@yahoo.com / ardiana.lidianatalia@yahoo.co.id / magda.ayutani@gmail.com

Alamat Organisasi : Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggitang, Kab. Flores Timur, NTT

No Telepon Organisasi : Hp 081338008705 / 082188842542 / 082188842706

No Fax Organisasi (jika ada) :

Website Organisasi (jika ada) : [www//ayutaniblogspot.com](http://www/ayutaniblogspot.com)

Jumlah Staf tetap:

- a. Laki-laki : 3 orang
- b. Perempuan : 4 orang

Akte Pendirian Organisasi: Nomor 3 Tanggal 10 November 1998, Akte Pembaruan Nomor 8 tanggal 12 Mei 2008, Terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI, Nomor AHU-3003. AHA.01.02. Tahun 2008.

Lengkapi dengan copy 1 rangkap jika telah memiliki

Ada

Tidak

Sejarah, Visi dan misi Organisasi:

Jelaskan secara singkat tentang sejarah dan misi organisasi anda, pengalaman yang relevan dengan proyek yang diusulkan berikut nama donor dan jumlah anggaran yang dikelola, maksimal 250 kata.

Yayasan Ayu Tani Mandiri berawal mula dari sebuah kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang bernama Ayu Tani Group. Bidang gerak KSM Ayu Tani Group adalah simpan pinjam dan penangkar benih. Terkhusus bidang gerak arisan dan simpan pinjam sangat mendapat simpati oleh masyarakat di sekitarnya sehingga lambat laun terorganisir kelompok – kelompok baru. Dengan kenyataan ini, para penggagas KSM Ayu Tani Group merasa penting untuk mendirikan sebuah lembaga payung yang berbentuk Yayasan dan diberi nama YAYASAN AYU TANI. Yayasan ini mendapatkan Akta Notaris No 3, tanggal 10 Nopember 1998 dan terdaftar di Kantor Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Jumat tanggal 11 Desember 1998, dengan Nomor 37/Yayasan/1998/PN.Ltk.

Sejalan dengan lahirnya Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, maka Yayasan Ayu Tani melakukan revisi atas AD-ART dan pembuatan Akta baru Nomor 08 Tanggal 12 Mei 2008 oleh Notaris Gervatius Portasius Mude, SH. Akta ini selanjutnya didaftar ke Departemen Hukum dan HAM RI Nomor AHU-3003.AH.01.02 Tahun 2008 pada tanggal 9 Juli 2008.

Visi :

Terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat tani Lamaholot yang kritis, demokratis dan berkeadilan berbasis pada budaya lokal.

Missi :

- Memperkuat kapasitas petani (L/P) dalam pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan;
- Mengembangkan model ekonomi produksi dan pemasaran yang adil;
- Memperkuat organisasi petani untuk meningkatkan posisi tawar petani;
- Memperkuat model pengelolaan hutan berbasis masyarakat secara berkelanjutan;
- Memperkuat kapasitas lembaga (Ayu Tani) yang profesional, demokratis dan transparan dalam mendukung pendampingan petani;
- Mendorong terwujudnya kemandirian pangan komunitas.

Pengalaman Kerja

- 1) Program pertanian berkelanjutan, bekerja sama dengan VECO : tahun 2009 Rp.31.362.500, tahun 2010 Rp. 385.900.000, tahun 2011 Rp. 250.970.000. Tahun 2012 Rp 233.050.000, tahun 2013 senilai Rp. 198.250.000. Sejak tahun 2014 VECO bekerja sama langsung dengan KSU Jantan yang kehadirannya difasilitasi Yayasan Ayu Tani.
- 2) Fasilitasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan pendekatan HKm dan HTR. Bekerja sama dengan Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara (SAMANTA-Mataram). Tahun 2009 Rp. 30.000.000, Tahun 2012 Rp, 99.810.000. Tahun 2013 RFp. 225.0009.000, Rp. Tahun 2015 Rp. 150.000.000.
- 3) Fasilitasi pengembangan lumbung pangan komunitas bekerja sama dengan Yayasan KEHATI - KRKP tahun 2010 Rp. 108.825.000 dan tahun 2011 Rp. 94.325.000.

- 4) Pengembangan program Desa Mandiri Pangan menuju Desa Sejahtera (DMP-DS) kerja sama dengan KRKP sejak tahun 2009 Rp. 12.000.000, tahun 2010 Rp. 12.000.000, Tahun 2011 Rp. 12.000.000, dan tahun 2012 Rp. 12.000.000.
- 5) Survey persiapan program dan dampak program pendampingan Swis Contac dan Sahabat Cipta di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata tahun 2012 Rp. 19.200.000 dan tahun 2014 senilai Rp. 9.450.000, tahun 2015 Rp. 112.000.000.
- 6) Membangun model pengelolaan hutan dengan skema HKm di KBA Ili Wengot, kerja sama dengan Yayasan Burung Indonesia, tahun 2016 s/d 2017.
- 7) Audit Sosial Distribusi Pupuk Bersubsidi, kerja sama dengan KRKP, tahun 2016 s/d 2018.

Penilaian Kelayakan

Dana CEPF hanya dapat digunakan mendukung kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan CEPF dan tidak dapat dipergunakan dalam beberapa kegiatan tertentu.

Informasi lebih lanjut tentang Dana CEPF, silakan dilihat di website www.wallacea.org, atau menghubungi:

- email : hibah.wallacea@burung.org
- telepon: 0811 1975 836 (Rini Suryani - *Grant Management Officer*)

Apakah organisasi anda berada di bawah kendali/bertanggung kepada/dibiayai oleh pemerintah?

- Ya
 Tidak

Apakah aktivitas di dalam proyek ini termasuk melakukan pembelian tanah?

- Ya
 Tidak

Apakah aktivitas dalam proyek ini akan melibatkan pemindahan atau perubahan atas suatu objek atau bangunan yang bernilai budaya (termasuk benda bergerak dan tidak bergerak, situs, struktur, dan lanskap yang mengandung nilai arkeologi, paleontologi, sejarah, arsitektur, agama, estetika, atau nilai budaya lainnya)?

- Ya
 Tidak

Apakah proyek ini akan melibatkan pemindahan penduduk atau aktivitas lain yang termasuk dalam kategori pemindahan paksa?

- Ya
 Tidak

Penjelasan Proyek

Judul Proyek : Membangun model pengelolaan hutan dengan skema HKM di kawasan Ili Wengot

Lokasi Proyek:

- a. Negara : Indonesia
- b. Provinsi : Nusa Tenggara Timur
- c. KBA yang terdampak : Ili Wengot / IDN 305
- d. Kabupaten/kota : Flores Timur
- e. Desa : Desa Hikong, Desa Boru dan Desa Boru Kedang

Durasi Proyek: Mei 2017 s/d Juli 2018

Tuliskan jangka waktu perkiraan proyek Anda dalam hitungan bulan.

Arahan Strategis dari Profil Ekosistem Wallacea CEPF:

- [] 1. Tindakan untuk mengatasi ancaman yang spesifik bagi spesies prioritas
- [v] 2. **Meningkatkan pengelolaan kawasan (KBA) yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi**
- [v] 3. **Mendukung pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan dan koridor prioritas**
- [] 4. Memperkuat aksi berbasis masyarakat untuk melindungi spesies dan kawasan laut
- [] 5. Melibatkan sektor swasta sebagai peserta aktif dalam konservasi kawasan dan koridor prioritas, di bentang alam produktif, dan di seluruh Wallacea
- [] 6. Meningkatkan kapasitas masyarakat sipil untuk aksi konservasi yang efektif di Wallacea

Jumlah Dana yang Diusulkan: Rp. 250.027.500.

Masukkan jumlah dana yang dimintakan kepada CEPF dalam Rupiah, dengan nilai tukar Rp13,200/USD

Total Dana Proyek: Rp. 250.027.500.

Total dana proyek secara keseluruhan, termasuk di dalamnya yang diusulkan didanai oleh CEPF (dalam Rupiah)

Anggaran Proyek:

Lampirkan rincian anggaran yang diusulkan dalam format excel seperti yang telah disediakan

Aspek Kerangka Pengaman

RIT dapat meminta pemohon untuk memberikan informasi tambahan dan dokumentasi proyek jika proyek tersebut memiliki potensi untuk memicu Kerangka Pengaman (*Safeguards*). Informasi lebih lanjut tentang aspek Kerangka Pengaman, silakan

- email : hibah.wallacea@burung.org
- telepon: 0811 1975 836 (Rini Suryani - Grant Management Officer)

Aspek Lingkungan

Apakah proyek yang diusulkan melibatkan kegiatan yang mungkin memiliki dampak buruk terhadap lingkungan?

Ya

Tidak

Keterangan:

Berikan penjelasan mengenai dampak terhadap lingkungan dan mitigasinya jika jawaban pertanyaan di atas adalah Ya.

Aspek Sosial

Apakah proyek yang diusulkan melibatkan kegiatan yang cenderung memiliki dampak buruk/negatif pada masyarakat lokal?

Ya

Tidak

Keterangan:

Berikan penjelasan mengenai dampak sosial dan mitigasinya jika jawaban pertanyaan di atas adalah Ya.

Proposal

Bagian ini untuk memberikan gambaran dari konsep proyek.

A. Alasan Proyek:

Menjelaskan alasan bagi aksi konservasi (karena adanya ancaman dan atau peluang) yang ingin dilakukan dan apa yang akan terjadi jika proyek ini tidak dilaksanakan, maksimal 500 kata.

Wukoh Lewoloroh merupakan kawasan hutan yang ditetapkan sejak pemerintahan Hindia Belanda tahun 1932 sebagai hutan tutupan. Kemudian kawasan tersebut oleh pemerintah Indonesia ditetapkan sebagai kawasan hutan negara melalui SK Menteri Kehutanan RI Nomor 124/KPTS-II/90 dalam RTK 126 dengan fungsi lindung. Secara geografis kawasan seluas 12.960 ha berada di dua wilayah kabupaten yakni Flores Timur dan Sikka. Ili Wengot merupakan salah satu hamparan yang berada dalam kawasan hutan tersebut. *Sumber data : Dinas Kehutanan Flores Timur).*

Masyarakat yang berdiam di sekitar kawasan hutan ini, yaitu masyarakat Desa Boru dan Boru Kedang (Kabupaten Flores Timur) dan Desa Hikong (Kabupaten Sikka) memiliki ketergantungan tinggi pada kawasan ini. Hal ini disebabkan karena dari dulu, sebelum adanya penetapan sebagai hutan lindung, orang tua mereka sangat menggantungkan hidupnya pada areal ini terutama untuk kegiatan pertanian. Sejak ditetapkan sebagai hutan lindung, masyarakat kehilangan areal kelola. Hal ini semakin menjadi problem dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Ketegangan inilah yang kemudian memunculkan kebijakan agar ada jalan tengah untuk menjembatani kebutuhan lahan oleh petani dan kebutuhan konservasi untuk kepentingan yang lebih luas.

Dengan pemikiran ini maka pada tahun 2011, pemerintah pusat melalui Departemen Kehutanan RI memberikan SK Pencadangan areal kelola kepada masyarakat seluas 214 ha melalui SK Nomor : 215/2011, tertanggal 10 Oktober 2011. Atas SK Penetapan Areal Kerja ini maka Bupati Flores Timur mengeluarkan SK Penetapan Ijin Usaha Pengelolaan (IUP) dengan Nomor 215 Tahun 2011 seluas 214 Ha yang diperuntukan bagi 422 keluarga petani dari tiga desa (Hikong, Boru Kedang dan Boru). Luasan ini mencakup hamparan Baologun, Tige Gulo, Watu Ruha, Terang Gete dan Wolo Mage.

Surat sakti ini telah membuka ruang akses masyarakat untuk beraktivitas dalam kawasan Ili Wengot. Namun sayangnya implementasi di lapangan sungguh memprihatinkan. Faktanya sejak diterbitkannya SK PAK dan IUP HKm ternyata bahwa kondisi kerusakan hutan Ili Wengot semakin meluas. Padahal sebelum adanya izin HKm, masyarakat takut untuk mengelola lahan dalam kawasan hutan lindung ini karena sering dilakukan penertiban oleh aparat Pemerintah Daerah. Namun sejak adanya SKP PAK dan IUP HKm, semakin banyak masyarakat petani yang membuka kebun dengan mengabaikan kewajiban sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam ijin HKm yaitu "*meningkatkan fungsi ekologi dan meningkatnya ekonomi bagi masyarakat petani*". Masyarakat cenderung melihat HKm sebagai peluang untuk memperluas lapangan kerja tetapi tidak diimbangi dengan kemauan untuk meningkatkan fungsi ekologi dari kawasan hutan tersebut

Adapun beberapa alasan utama sehingga implementasi HKm belum maksimal untuk melestarikan hutan demi peningkatan fungsi ekologi di kawasan ini yaitu :

1) Perencanaan pengelolaan yang belum maksimal.

Pada tahap awal pemberian ijin HKm, rencana pengelolaan sudah dibuat pada tingkat kelompok tani namun tidak didukung dengan perencanaan yang lebih detail pada level petani (kebun). Hal ini disebabkan karena tuntutan keterdesakan waktu ijin HKm sehingga rencana kerja dimaksud hanya untuk memenuhi syarat formal untuk mendapat IUP Hkm. Tidak heran kalau rencana yang dihasilkan tidak detail dan cenderung tidak konkrit.

Selama tahun 2016 dalam kerja sama dengan Burung Indonesia melalui CEPF, sudah difasilitasi pembuatan perencanaan kebun petani. Namun demikian pembuatan rencana kebun ini belum mencakupi keseluruhan petani. Dari 422 keluarga petani pengelola HKm, masih terdapat 121 keluarga petani yang belum memiliki rencana kebun. Demikian juga halnya dengan rencana kerja pada tingkat hamparan. Sejauh ini baru satu hamparan yang memiliki dokumen rencana kerja yaitu hamparan Baologun sedangkan 3 hamparan lainnya belum memiliki rencana kerja kolektif hamparan untuk mempercepat perwujudan hutan lestari pada areal kawasan tersebut. Adapun kawasan yang belum memiliki rencana kerja konservasi kawasan yaitu Kawasan Tige Gulo, Watu Ruha dan Wolo Mage.

2) Keterbatasan kemampuan petani dan organisasi petani untuk implementasi HKm.

Idealnya rencana kerja yang disusun untuk dilaksanakan. Namun yang terjadi, rencana kerja yang disusun pada tahap awal, belum diimplementasikan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan financial dari kelompok. LPMA sebagai lembaga petani pengelola sejauh ini sudah menyusun rencana untuk mendapatkan sumber dana mandiri dalam bentuk yuran anggota. Koperasi LPMA belum bisa mandiri secara finansial apalagi baru dibentuk pada tahun 2016 melalui project kerja sama Burung Indonesia dan Ayu Tani. Kemampuan finansial ini merupakan factor kunci dalam implementasi rencana kerja terutama rencana kebun dari 301 petani yang difasilitasi pada tahun 2016 atas dukungan kerja sama Burung Indonesia.

3) Kapasitas Pengurus yang belum maksimal untuk melakukan mobilisasi dan negosiasi program secara vertical dan horisontal/level petani.

LPMA Nian Ue Wari Tana Kera Pu adalah organisasi petani pengelola HKm di kawasan Ili Wengot. Awalnya, organisasi ini lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap penangkapan 10 petani pada tahun 2008 oleh Pemda Flotim. Atas dasar ini maka kelembagaan LPMA didorong untuk melakukan perjuangan untuk merebut hak kelola. Perjuangan mencapai hasil dengan dikeluarkannya SK PAK dan IUP HKm pada tahun 2011. Kurang lebih empat tahun sejak diterbitkannya SK PAK dan IUP, LPMA tidak memiliki kemampuan secara mandiri untuk implementasi HKm sesuai aturan. Pada tahun 2014 dalam kerja sama antara Yayasan Ayu Tani dengan SAMANTA maka kurang lebih 60% dari 50 Ha di kawasan Baologun bisa dilakukan

konservasi. Tahun 2016 dalam kerja sama dengan Burung Indonesia memperluas konservasi di Kawasan Baollogun hingga mencapai 80% dan sebagian di kawasan Tige Gulo (40 %).

- 4) Kurang terlaksananya peran pembinaan dan penegakan aturan oleh Pemerintah Dinas Kehutanan yang bertanggung jawab menjadi pelaksana program HKM kurang berperan dalam memberikan panduan dan pembinaan bagi pelaksanaan program HKM di lapangan. Petani mengambil tindakan berdasarkan yang mereka tahu dan inginkan, kemudian tidak pernah ada proses pemantauan dan evaluasi dari Dinas. Hal ini menjadi salah satu evaluasi dari kegagalan program HKM di awal.

Mempertimbangkan cakupan masalah di atas maka intervensi project ini sangat penting nilainya bagi perbaikan implementasi HKM di Ile Wengot. Itu berarti jika project ini tidak dilaksanakan maka akan berakibat pada beberapa hal:

1. Punai Flores (*Treron floris*) dan Serindit Flores (*Loriculus flosculus*) yang teridentifikasi sebagai species yang terancam punah secara global merupakan species prioritas yang tercatat ada di Ile Wengot. Implementasi HKM yang tidak sesuai tujuan tentu akan merusak habitat species dimaksud yang pada akhirnya menghambat perkembangan populasi.
2. Konsep HKM pada dasarnya bertujuan agar pengelolaan kawasan menjadi lebih dimana akses masyarakat bisa dikontrol agar tetap berkontribusi terhadap konservasi keragaman hayati. Implementasi HKM yang tidak terkontrol yang terjadi saat ini jika tidak segera diatasi akan berdampak lebih luas terhadap kawasan Ile Wengot dimana luas dan intensitas kerusakan akan semakin meningkat.
3. Pengelolaan HKM yang tidak sesuai konsep dan prosedur akan mengancam ketersediaan air bagi masyarakat di Boru, Hokeng, dan wilayah Sikka bagian timur. Kawasan Ile Wengot merupakan hulu sungai yang mengalir ke Sikka. Beberapa mata air yang dimanfaatkan oleh masyarakat Boru dan Hokeng juga bersumber dari kawasan ini. Kerusakan kawasan ini akan berakibat pada berkurangnya debit air yang ada.

B. Apakah dampak yang dapat diharapkan dari pelaksanaan proyek ini bagi:

Jelaskan untuk masing-masing huruf maksimal 100 kata.

- a. Jenis-jenis prioritas yang terdapat di dalam KBA

Berdasarkan berbagai catatan penelitian, Punai Flores (*Treron floris*) dan Serindit Flores (*Loriculus flosculus*) juga pernah ditemukan di Ile Wengot. Dengan kata lain, Ile Wengot merupakan salah satu habitat bagi 2 species prioritas ini. Perbaikan implementasi HKM akan berdampak pada pemulihan habitat yang pada gilirannya bisa memberikan kemungkinan untuk perkembangan populasi species prioritas dimaksud.

- b. Pengelolaan KBA yang lebih baik

HKM pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kawasan agar berkontribusi secara ekonomi dan ekologis. Dengan demikian keberhasilan implementasi project ini akan berdampak pada pemulihan kondisi habitat karena terjadi keseimbangan antara tekanan kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologi. Luas habitat yang akan mengalami pemulihan adalah minimal 80% dari total luas areal HKM seluas 214 Ha.

- c. Masyarakat di sekitar KBA dan para pihak terkait lainnya
 Jumlah petani yang mendapat manfaat langsung dari usulan ini yaitu 215 kk petani dari 421 petani yang terdata dalam SK PAK HKm. 215 petani ini tersebar di tiga desa yaitu Desa Hikong, Desa Boru dan Desa Boru Kedang. Dengan dukungan ini maka 301 kebun yang sedang dikelola oleh 215 petani akan ditanami dengan aneka tanaman komoditi yang bernilai ekonomi.

C. Pendekatan Proyek:

C.1 Tujuan Proyek : Pengelolaan kawasan Ili Wengot melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) mendukung kelestarian hutan dan penghidupan masyarakat petani .

C.2 Keluaran Proyek:

Merupakan jawaban atas akar-akar masalah yang diidentifikasi dalam Alasan Proyek.

1. Terdapat rencana hamparan dan rencana kebun baru yang membuat rencana perlindungan pada areal HKm yang dikelola LPMA.
2. Rencana hamparan dan rencana kebun 301 petani anggota kelompok yang telah disusun diimplementasikan dan dipantau oleh pengurus kelompok kerja/kelompok tani .
3. Peningkatan kapasitas organisasi HKm pada tingkat koperasi pengelola (LPMA) maupun pada tingkat kelompok kerja.

C.3 Aktivitas Proyek:

Aktivitas-aktivitas proyek merupakan sarana untuk mewujudkan keluaran-keluaran (output) proyek.

Keluaran 1	Aktivitas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyusunan rencana kebun baru (khusus untuk petani yang belum memiliki dokumen rencana kebun) 2. Fasilitasi penyusunan rencana kerja hamparan (3 hamparan) 3. Fasilitasi pembuatan skesta hamparan (Tige Gulo, Watu Ruha, dan Wolo Mage).
Keluaran 2	Aktivitas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pengembangan pembibitan untuk tanaman perkebunan, dan tanaman untuk konservasi. 2. Fasilitasi kegiatan penanaman 3. Pelatihan dan praktek budidaya (kopi dan kakao). 4. Penanaman pohon pada lokasi yang diperuntukan untuk konservasi
Keluaran 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan manajemen organisasi dan manajemen koperasi untuk Pengurus dan Pengawas. 2. Fasilitasi pertemuan Pengurus LPMA dengan anggota 3. Fasilitasi seri diskusi pengelolaan HKm antara Koperasi LPMA dengan KPH Flotim, BAPEDA, BPMD, Dinas Pertanian – Perkebunan, Dinas Koperasi UKM dan dengan Pemdes.

C.4 Strategi, metode, dan perangkat pelaksanaan

Menjelaskan cara bagaimana aktivitas-aktivitas dilaksanakan untuk mencapai tujuan proyek, termasuk semua jenis perangkat (tools), metode, maupun analisis yang digunakan dalam

pengorganisasian, kampanye, advokasi, riset dan aksi lapangan, pelatihan dan lain-lain. Lampirkan metode dan perangkat baku yang telah sering digunakan, atau laporan dari aktivitas serupa yang pernah dijalankan lembaga.

1) *Fasilitasi pembuatan skesta hamparan (Tige Gulo, Watu Ruha, dan Wolo Mage).*

Fasilitasi pembuatan skesta hamparan dilakukan untuk hamparan Tige Gulo, Watu Ruha, Terang Gete / Wolo Mage. Skesta hamparan dilakukan untuk mengetahui batas masing-masing hamparan, dan siapa saja pemilik kebun dalam hamparan dimaksud. Dilakukan dengan transek dengan melibatkan pengurus kelompok dan pemerintah desa. Ini dilakukan sebagai tahapan paling awal dalam proyek ini. Tim proyek memiliki pengalaman dalam melakukan kegiatan seperti ini terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan PRA di wilayah desa lain terutama metode transek. Kegiatan transek akan menghasilkan skesta hamparan yang akan menjadi dasar untuk penyusunan rencana kebun dan rencana hamparan.

2) *Fasilitasi penyusunan rencana kebun baru (khusus untuk petani yang belum memiliki dokumen rencana kebun)*

Fasilitasi pembuatan rencana kebun dilakukan untuk menghasilkan skesta kebun masing-masing petani yang terdiri dari skesta kondisi kebun saat ini dan skesta kebun yang diimpikan. Skesta ini mencakupi informasi tentang jumlah dan jenis tanaman yang ditanam dengan jarak tanam masing-masing serta mempertimbangkan analisa kebutuhan keluarga terkait pangan, papan, sandang, pendidikan, kesehatan. Dalam pembuatan skesta kebun impian, petani harus mempertimbangkan produktifitas secara ekonomi dan secara ekologis. Ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemilik kebun masing-masing dan keluarga.

3) *Fasilitasi penyusunan rencana kerja hamparan (3 hamparan)*

Penyusunan rencana kerja hamparan dilakukan setelah tersedianya skesta hamparan dan rencana kebun. Rencana kerja hamparan penting untuk memastikan apa saja yang harus dilakukan oleh petani di dalam areal hamparan berkaitan dengan suksesnya rencana kebun dan rehabilitasi lahan yang ditemukan dalam kegiatan transek. Dimulai dengan mengumpulkan informasi yang diperoleh dari kegiatan transek dan rencana kebun yang mesti ditindak lanjuti.

4) *Pelatihan dan praktek budidaya (kopi dan kakao).*

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ketrampilan berkaitan dengan seleksi benih, persemaian, pembenaman benih, perawatan benih dan penanaman. Dilakukan di tiga hamparan dengan melibatkan petani yang sudah memiliki dokumen rencana penanaman. Fasilitator dengan melibatkan karyawan PT Rerolara Hokeng yang sudah punya pengalaman. Dilakukan setelah tersedianya rencana kebun, rencana hamparan.

5) *Fasilitasi pengembangan pembibitan untuk tanaman perkebunan dan tanaman untuk konservasi.*

Kegiatan ini sebagai persiapan untuk implementasi penanaman tanaman sesuai rencana kebun dan rencana hamparan. Kegiatan ini akan dipelopori oleh para alumni dari dari kegiatan

pelatihan pembibitan yang dilakukan sebelumnya. Jumlah dan jenis tanaman akan disesuaikan dengan rencana kebun dan rencana hamparan. Dengan cara ini masyarakat akan menyiapkan bibit tanaman secara swadaya.

6) *Fasilitasi kegiatan penanaman*

Kegiatan ini lebih ditujukan untuk penanaman pada kebun dan konservasi pada areal khusus yang tertuang dalam rencana kerja hamparan. Pada tingkat kebun, petani akan didampingi secara khusus untuk melihat kondisi geografis kebun dan memastikan jarak tanam yang disesuaikan dengan kemiringan tanah. Setelah menentukan jarak tanam, dibuatkan ajir, pembuatan lobang tanam dan penanaman. Kegiatan ini akan dipelopori oleh para kader petani yang sudah dilatih sebelumnya.

7) *Penanaman pohon pada lokasi yang diperuntukan untuk konservasi*

Dalam aturan pengelolaan yang telah difasilitasi sebelumnya sudah disepakati untuk dilakukan konservasi pada areal tertentu seperti hutan adat, mata air, dan radius 5 meter dari pinggir sungai. Untuk itu dalam kegiatan transek harus bisa ditetapkan areal-areal khusus yang akan dilakukan konservasi secara bersama oleh petani dalam hamparan.

8) *Pelatihan manajemen organisasi dan manajemen koperasi untuk Pengurus dan Pengawas.*

Pelatihan manajemen organisasi ini akan mencakupi beberapa topik yang relevan dan disesuaikan dengan kebutuhan riil kelompok terutama dalam menjalankan organisasi dan melakukan monitoring pengelolaan kawasan.

9) *Fasilitasi pertemuan Pengurus LPMA dengan anggota*

Pertemuan ini akan dilaksanakan setiap bulan, tim proyek akan memastikan para pengurus untuk menyelenggarakan pertemuan bulanan bersama anggota. Pertemuan bulanan ini sebetulnya bertujuan untuk melaksanakan kegiatan simpan pinjam dan motivasi berkaitan dengan menghidupkan koperasi LPMA, serta mensosialisasi berbagai kebijakan berkaitan dengan koperasi. Melalui pertemuan bulanan ini, diharapkan kelompok akan semakin kuat dan bisa menyelenggarakan pertemuan rutin secara mandiri.

10) *Fasilitasi seri diskusi pengelolaan HKM antara Koperasi LPMA dengan KPH Flotim, BAPEDA, BPMD, Dinas Pertanian – Perkebunan, Dinas Koperasi UKM dan dengan Pemdes.*

Tujuan seri diskusi ini utamanya adalah melakukan peningkatan kapasitas dan memberdayakan tugas pemerintah sebagai penanggung jawab program Hutan Kemasyarakatan. Olehnya, selain hadir dalam serial diskusi mereka juga akan dilibatkan dalam kegiatan kelompok seperti penyusunan sketsa hamparan dan rencana kerja. Program HKM merupakan program pemerintah, oleh karena itu pemerintah perlu terlibat dalam pemantauan dan evaluasinya.

Selain itu, diskusi dengan para pihak dilakukan untuk mengembangkan jaringan LPMA kepada para pihak agar memberikan dukungan terhadap keberadaan LPMA dan kegiatannya. Pertemuan ini akan dilakukan beberapa kali kali dan disesuaikan dengan kebutuhan dengan melibatkan pihak yang relevan.

Strategi dan Keberlanjutan Proyek

Kaitan dengan Strategi Investasi CEPF:

Terangkan kaitan antara proyek Anda dengan strategi investasi CEPF yang disajikan dalam Profil Ekosistem Wallacea. Jawaban hendaknya mengulas kaitan dengan arahan strategis dan prioritas investasi di dalam Profil Ekosistem Wallacea.

Project ini akan menjawab 2 arahan strategis dan 3 investasi prioritas yakni:

1. Arahan strategis 2 pada investasi prioritas 2.2. yakni *mengembangkan dan menerapkan pendekatan pengelolaan yang mengintegrasikan pemanfaatan yang berkelanjutan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pemangku kepentingan local dengan konservasi nilai-nilai ekosistem di KBA di luar kawasan konservasi*. Implementasi HKM yang benar merupakan bentuk dari upaya memberikan akses bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat dari pengelolaan kawasan secara berkelanjutan. Pemangku kepentingan local yang akan terlibat adalah terutama masyarakat.
2. Arahan strategis 3 pada investasi prioritas 3.1. yakni *mendukung lembaga masyarakat untuk melestarikan kearifan lokal pemanfaatan sumberdaya alam, dan untuk mengembangkan dan menerapkan aturan tentang pemanfaatan sumberdaya alam*. Project ini mendorong pelaksanaan aturan tentang HKM secara tepat dan konsekwen sehingga tujuan pengelolaan kawasan bisa tercapai yakni memberikan akses pemanfaatan kepada masyarakat dengan tidak mengabaikan kepentingan konservasi keragaman hayati.
3. Arahan strategis 3 pada investasi prioritas 3.2. yakni *mengembangkan alternative mata pencaharian sehingga tidak bergantung kepada praktek pengelolaan sumberdaya alam yang tidak berkelanjutan, dan meningkatkan pasar bagi produk dan jasa yang dihasilkan secara berkelanjutan*. Project ini akan mendorong intensifikasi lahan dan peningkatan nilai jual produk pertanian dan perkebunan terutama kakao dan kopi.

Mitra kerja (stakeholders) dalam Proyek:

Tuliskan setiap mitra yang akan terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek ini serta para pihak lain yang akan berperan penting dalam pelaksanaan Proyek. Proyek sebaiknya dirancang untuk bersinergi dengan program sejenis dari pemerintah dan atau lembaga lain, sehingga berpotensi menghasilkan dampak yang lebih nyata.

Nama Mitra Kerja	Peran Mitra dalam Proyek ini
Pegiat Koperasi	Pelaku pemberdayaan organisasi untuk penguatan kapasitas Pengurus, Pengawas dan Tim Manajemen
Departemen Kehutanan RI, BPDAS NTT, Pemerintah Kabupaten Flores Timur	Monitoring program HKM yang telah diberikan dengan sumber biaya negara, Perpanjangan IUP
Pemerintah Desa	Untuk pengawasan dan dukungan financial
Mitra strategis	Sharing pengetahuan, pengalaman
Pemangku adat	Untuk seremoni adat Penguatan kesepakatan

Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial:

Bagaimana peranan laki-laki dan perempuan dalam kegiatan yang diusulkan (dengan memfokuskan pada kebutuhan perempuan)? Bagaimana strategi Anda agar kegiatan ini dapat memberikan dampak pada semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok marginal.

Target masyarakat yang menerima usulan ini adalah laki dan perempuan, bertempat tinggal di sekitar kawasan Ili Wengot yang memiliki sejarah dan ikatan emosional dengan kawasan ini secara genealogis. Rumah tangga (keluarga) menjadi pendekatan pengorganisasian. Dengan demikian, tidak ada pembedaan hak dan peran antara laki dan perempuan dalam urusan organisasi, pengelolaan dan pengawasan, serta pemanfaatan hasil program.

Rencana keberlanjutan:

Jelaskan bagaimana strategi Anda agar bagian-bagian dari proyek ini atau hasil-hasilnya dapat dilanjutkan atau direplikasi setelah berakhirnya proyek baik oleh lembaga Anda sendiri maupun pihak lain.

Model pemberdayaan berbasis koperasi diharapkan mampu menjamin keberlanjutan proyek ini. Bentuk Koperasi menjadi jaminan LPMA akan didampingi oleh para pihak terutama Dinas Kehutanan dan Dinas Koperasi. Apabila dukungan proyek ini berakhir maka diharapkan wadah koperasi ini yang menjamin keberlanjutan. Dengan demikian, upaya yang dilakukan adalah mempersiapkan petani dalam wadah koperasi yang nantinya menjamin keberlanjutan usaha pengelolaan dan sampai pada pemasaran bersama hasil komdita. Kemandirian finansial lambat laun akan terpenuhi oleh organisasi petani sendiri.

Mengingat bahwa HKM di lokasi Iliwengot adalah yang pertama di wilayah ini maka diharapkan bahwa di lokasi ini menjadi tempat belajar bagi para pihak terutama petani yang akan mengembangkan skema HKM di wilayahnya. Aspek organisasi dan teknis pertanian (pengelolaan), dua hal yang menjadi penting dalam konsep pengelolaan hutan dengan skema apapun, selain HKM.

Lampiran: *Logical Framework Analysis*

Pastikan bahwa pernyataan Judul, Tujuan Proyek, Keluaran, dan Aktivitas sama seperti yang tertulis dalam badan Proposal.

Judul proyek: Membangun model pengelolaan hutan dengan skema HKm di KBA Ili Wengot

Aspek	Indikator	Alat Verifikasi	Asumsi
Impact: Meningkatnya fungsi ekosistem hutan di kawasan Ili Wengot	<ul style="list-style-type: none"> - Pemulihan habitat Serinditi Flores dan Punai Flores seluas 214 Ha. - Luasan tutupan hutan pada lokasi kerja HKm meningkat 80% pada tahun ke 3 setelah berakhirnya proyek. - 215 kk yang memiliki lahan, mengembangkan aneka tanaman untuk peningkatan ekonomi pada kebun yang terdapat pada areal kerja HKm. 	Laporan pemantauan dan pengukuran debit mata air Data tanaman yang hidup di lokasi HKm Peta tutupan lahan	
Outcome/Tujuan Pengelolaan kawasan Ili Wengot melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) mendukung kelestarian hutan dan penghidupan masyarakat petani	50% dari 214 Ha lahan HKm ditanami aneka tanaman komoditi agro dan pangan. 20% dari penduduk Desa Hikong, Boru dan Boru Kedang memiliki kebun yang ditanami dengan aneka tanaman komoditi	<ul style="list-style-type: none"> - Data petani pengelola HKm - Data tanaman Agro dan tanaman pangan 	
Output 1 Terdapat rencana hamparan dan rencana kebun baru yang membuat rencana perlindungan pada areal HKm yang dikelola LPMA	Tersusunnya rencana kerja hamparan (Tige Gulo, Waturuha, Wolo Mage) yang memuat rencana perlindungan tanah dan air pada areal HKm masing-masing dengan total luas areal mencapai 150 Ha 110 petani yang belum memiliki dokumen rencana kebun, memiliki dokumen rencana kebun	Dokumen rencana kerja hamparan (3 hamparan) Dokumen rencana kebun Laporan kegiatan kelompok Foto pendukung	

1.1. Fasilitasi perencanaan kebun baru petani pengelola di hamparan hamparan Tige Gulo, Watu Ruha dan Wolomage	80 petani di hamparan Tige Gulo, Watu Ruha dan Wolomage memiliki dokumen rencana kebun dengan total luas mencapai 50 ha pada Bulan III	Daftar hadir Dokumen rencana kebun Foto pendukung	
1.2. Fasilitasi penyusunan rencana kerja pada tingkat hamparan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksana 1 kali pertemuan untuk masing-masing hamparan yang dihadiri oleh minimal 50% petani untuk masing-masing hamparan pada Bulan III 2. Tersedianya dokumen rencana kerja hamparan yang menetapkan lokasi-lokasi penting untuk dikonservasi pada bulan ke III 	Daftar hadir Notulensi Foto pendukung	
1.3. Pembuatan skesta hamparan di hamparan: Tige Gulo, Watu Ruha, Wolo Mage	3 hamparan memiliki skesta hamparan yang terdata blok kerja/kebun, nama petani pengelola serta luas areal kelola pada bulan pertama pelaksanaan project, pada Bulan I	Skesta hamparan Daftar hadir Foto pendukung	
Output 2 Rencana hamparan dan rencana kebun 301 petani anggota kelompok yang telah disusun diimplementasikan dan dipantau oleh pengurus kelompok kerja/kelompok tani.	<p>75% dari rencana kebun lama masing-masing petani ditanami aneka tanaman sesuai perencanaan dengan mempertimbangkan keseimbangan jenis.</p> <p>50% dari masing-masing rencana kebun yang baru ditanami aneka tanaman sesuai rencana.</p>	Data petani dan tanaman Foto pendukung	
2.1. Fasilitasi pengembangan pembibitan untuk tanaman perkebunan, dan tanaman untuk	Tersedia aneka bibit tanaman kayu/bambu, tanaman komoditas dan tanaman buah mencapai 25.000 anakan untuk	Data bibit Daftar hadir Laporan kegiatan Foto pendukung	

konservasi.	ditanam petani.		
2.2. Fasilitasi kegiatan penanaman	30% kebun lama dari 300 kebun di tiga hamparan ditanami aneka tanaman, rata-rata 200 ph/kebun.	Data tanam Foto pendukung	
2.3. Pelatihan dan praktek budidaya (kopi dan kakao).	15 petani utusan hamparan terlibat dalam kegiatan pelatihan selama 2 hari.	Daftar hadir Foto pendukung	
2.4. Penanaman pohon pada lokasi yang diperuntukan untuk konservasi	1000 anakan bambu / beringin ditanam pada areal hutan adat dan sepanjang sungai	Data tanaman Foto pendukung	
Output 3 Peningkatan kapasitas organisasi HKm pada tingkat koperasi pengelola (LPMA) maupun pada tingkat kelompok kerja.	1. Pengurus dan Pengawas LPMA memiliki perangkat monitoring pengelolaan dan diimplementasikan mulai pada bulan V 2. LPMA memiliki jaringan dengan pemerintah Kabupaten dan Desa dalam bentuk program atau kegiatan tertentu		
3.1. Pelatihan manajemen organisasi dan monitoring pengelolaan kawasan bagi Pengurus dan Pengawas.	1. Terselenggaranya pelatihan tentang manajemen organisasi bagi 10 orang pengurus/Pengawas, pada bulan VII 2. Terselenggaranya Loklatih selama 2 hari tentang perumusan tools monitoring pengelolaan kawasan yang dihadiri oleh 5 orang dari masing-masing hamparan (15), terlaksana pada Bulan IV. 3. Dokumen Tools monitoring tersedia sebagai panduan dalam melakukan monitoring berkala terhadap pengelolaan kawasan.	Daftar hadir Notulensi Dok laporan Foto pendukung Tools monitoring	
3.2. Fasilitasi pertemuan Pengurus LPMA dengan anggota	Terselenggaranya pertemuan bulanan LPMA yang dihadiri oleh seluruh Pengurus dan minimal 70% anggota.	Daftar hadir Notulensi Foto pendukung	

<p>3.3. Fasilitasi diskusi berkala pengelolaan HKm antara Koperasi LPMA dengan KPH Flotim, BAPEDA, BPMD, Dinas Pertanian – Perkebunan, Dinas Koperasi UKM dan dengan Pemdes.</p>	<p>Terselenggaranya minimal 2 kali pertemuan dengan para pihak tingkat kabupaten, dan 2 kali dengan Pemdes</p>	<p>Daftar hadir Notulensi Foto pendukung</p>	
--	--	--	--